

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik adalah fenomena sosial yang muncul ketika dua atau lebih pihak saling bertentangan karena tujuan, nilai, atau kepentingan yang berbeda. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ketegangan diplomatik, sengketa wilayah, hingga pertarungan bersenjata yang melibatkan aktor negara dan aktor non-negara. Konflik dapat terjadi dalam periode singkat atau lama. Konflik tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dapat membawa akibat yang serius terhadap kondisi kemanusiaan.

Somalia terletak di tanduk Afrika, berkaitan dengan jalur perdagangan internasional. Somalia memiliki beberapa komoditas unggulan, salah satunya adalah emas. Hal tersebut membuat Somalia menarik di mata negara lain hingga diperebutkan. Sejak tahun 1880, negara-negara yang memperebutkan Somalia adalah Britania, Perancis, serta Italia (Achudume, 2021). Daerah kekuasaan Britania disebut sebagai *Somaliland Protectorate*, daerah kekuasaan Perancis di sekitar Djibouti disebut sebagai *French Somaliland*, dan Italia menguasai daerah sepanjang pantai yang disebut *Italian Somaliland* (Achudume, 2021). Pembagian teritorial saat kolonialisme ini menciptakan ketegangan antar kelompok etnis dan fragmentasi identitas nasional sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya Konflik Somalia.

Konflik Somalia diperburuk oleh jatuhnya Rezim Siad Barre pada tahun 1991 yang mengakibatkan kekosongan kekuasaan di Somalia dan memicu

terjadinya perang saudara, konflik antar-klan, dan munculnya berbagai kelompok dengan tujuan untuk menguasai wilayah pedesaan serta perkotaan (Healy & Bradbury, 2010). Ketidakstabilan tersebut berujung pada hancurnya lembaga negara, banyaknya korban jiwa, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kerusakan infrastruktur, krisis kelaparan, serta migrasi besar-besaran para pengungsi (Healy & Bradbury, 2010). Dalam menghadapi krisis tersebut, salah satu aktor regional berupaya mencari jalan keluar. Inisiatif penting datang dari Uni Afrika melalui pembentukan misi perdamaian yang dikenal sebagai *African Union Mission in Somalia* (AMISOM).

AMISOM dipimpin oleh Letnan Jenderal Jim Beesigye Owoyesigire dan terdiri atas pasukan dari Djibouti, Kenya, Burundi, Etiopia dan Uganda. Pasukan terdiri dari 5 sektor dan dikerahkan ke wilayah yang mencakup Somalia tengah dan selatan. Polisi dari Nigeria, Sierra Leone, Zambia, Ghana, Kenya, dan Uganda juga berkontribusi di dalam AMISOM (AMISOM, 2024).

Tabel 1. Penyebaran Pasukan AMISOM

Pasukan	Sektor	Wilayah
Uganda	1	Banadir, Lower Shabelle
Kenya	2	Lower and Middle Jubba
Etiopia	3 & Sub Sektor 3	Bay, Bakool, dan Gedo
Djibouti	4	Hiiraan, Galgaduud
Burundi	5	Middle Shabelle

Sumber: Diolah oleh penulis

AMISOM didirikan pada 19 Januari 2007 dengan persetujuan *United Nations Security Council* (UNSC) sebagai bentuk misi pemeliharaan perdamaian

regional untuk menanggapi konflik di Somalia (AMISOM, 2024). AMISOM didirikan dengan mandat utama untuk melindungi *Transitional Federal Government* (TFG), menstabilkan keamanan dengan melatih angkatan bersenjata Somalia, melaksanakan operasi militer terhadap grup militan, melindungi warga sipil serta memfasilitasi pembangunan lembaga negara (Global Security, 2024). Pada tahun 2018, mandat AMISOM mengalami pembaruan (UNSC, 2018). Perubahan ini mencakup pengurangan jumlah tentara secara bertahap dan penambahan personel kepolisian untuk menerapkan hukum setempat, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas sektor keamanan dan lembaga di Somalia, serta mendukung proses rekonsiliasi nasional dan politik dengan tetap memberi perlindungan terhadap warga sipil.

AMISOM menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan mandatnya, termasuk grup bersenjata seperti Al-Shabaab yang menjadi ancaman besar dengan melancarkan serangan terhadap warga sipil. Selain itu, AMISOM juga menghadapi masalah pendanaan, kurangnya logistik, dan ketergantungan pada dukungan dari UN dan Uni Eropa (UE). Dengan adanya kompleksitas tersebut, penting untuk menganalisis secara rinci bagaimana AMISOM sebagai aktor diplomasi humaniter regional menangani konflik berkepanjangan di Somalia. Tahun 2018 hingga 2021 merupakan fase penting bagi keterlibatan AMISOM. Tahun 2018 menandai pergeseran mandat AMISOM yang lebih fokus pada stabilisasi, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian. Tahun 2021 menjadi tahun terakhir AMISOM beroperasi sebelum berganti menjadi misi baru. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana diplomasi humaniter yang

dijalankan AMISOM dapat menjawab kebutuhan kemanusiaan dan menciptakan stabilitas jangka panjang di Somalia.

Tinjauan pustaka dilakukan oleh penulis untuk menunjang penelitian. Skripsi berjudul “Peranan *an African Union Mission In Somalia* (AMISOM) Dalam Menangani Konflik Bersenjata Di Somalia” (Kemala, 2010) membahas peran AU melalui AMISOM dalam konflik bersenjata di Somalia. Mengeksplorasi upaya AMISOM untuk menstabilkan negara, memberikan bantuan kemanusiaan, dan meredakan Konflik Somalia. Upaya yang lainnya meliputi menciptakan kondisi kondusif yang berkepanjangan serta rekonstruksi.

Skripsi berjudul “Peran *African Union Mission In Somalia* (AMISOM) dalam Upaya Resolusi Konflik di Somalia” (Pratama, 2015) mengeksplorasi dinamika konflik yang terjadi di Somalia. Skripsi ini juga membahas fungsi strategis AMISOM sebagai misi penjaga perdamaian yang dimiliki oleh Uni Afrika. Menggunakan Konsep Organisasi Internasional, Regionalisme, Konflik, dan Resolusi konflik dalam menilai tanggung jawab aktor dalam Konflik Somalia. Ketiga konsep tersebut membantu untuk menentukan resolusi konflik yang tepat.

Skripsi berjudul “Peranan *African Union* (AU) dalam Menyelesaikan Konflik di Somalia” (Ruchiyat, 2017) menjawab mengenai peran AU untuk mengatasi konflik yang terjadi di negara anggotanya. Skripsi ini mengkaji peran AU melalui AMISOM untuk menciptakan kestabilan di wilayah Somalia. Melalui keamanan kolektif, AU dapat menciptakan kebebasan di Somalia. AU juga berperan untuk membantu memenuhi HAM.

Dengan menganalisis AMISOM dari sudut pandang diplomasi humaniter, penelitian ini dapat memperluas pemahaman. Tentang bagaimana norma-norma kemanusiaan dapat diimplementasikan. Hasil dari penelitian ini juga dapat memberikan saran yang penting untuk merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Mengingat banyaknya negara di Afrika tengah mengalami konflik yang sama, studi mengenai diplomasi humaniter AMISOM di tahun 2018–2021 dapat dijadikan referensi penting untuk merumuskan pendekatan yang lebih responsif dan adaptif terhadap krisis kemanusiaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis, maka rumusan masalah yang diajukan di dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana strategi diplomasi humaniter yang dijalankan oleh Uni Afrika melalui AMISOM dalam penanganan konflik berkepanjangan di Somalia tahun 2018–2021?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memenuhi persyaratan kelulusan untuk mendapatkan sarjana (S1) dari UPN “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik jurusan Hubungan internasional. Penelitian ini juga memberi pemahaman mengenai *Protracted Social Conflict* (PSC) dan *Humanitarian Diplomacy*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Uni Afrika melalui misi AMISOM menerapkan diplomasi humaniter dalam penanganan konflik berkepanjangan di Somalia dari tahun 2018 hingga 2021. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis strategi diplomasi yang digunakan oleh AMISOM dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang muncul sebagai akibat dari konflik berkepanjangan di Somalia. Dengan melakukan analisis ini, peneliti ingin menilai sejauh mana keberhasilan diplomasi humaniter yang dilakukan oleh Uni Afrika dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil, menciptakan situasi yang stabil, serta mendukung proses rekonsiliasi nasional di Somalia. Studi ini berusaha untuk menggambarkan peran organisasi regional dalam mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam kebijakan keamanan dan perdamaian di wilayah tersebut serta kontribusinya terhadap pembangunan di negara yang tengah menghadapi krisis internal.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Protracted Social Conflict* (konflik sosial berkepanjangan)

Artikel akademis yang berjudul “*The analysis of Protracted Social Conflict: A Tribute to Edward Azar*” (Ramsbotham, 2005) dan “*A Theory of Protracted Social Conflict*” (Kara, 2018) menguraikan tentang Teori Konflik Sosial Berkepanjangan yang dikembangkan oleh Edward E. Azar dalam bukunya yang berjudul “*The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases*” (Azar, 1990). Konflik sosial berkepanjangan menggarisbawahi bahwa

penyebab konflik dapat muncul dari faktor internal dan juga bisa terjadi antar negara, bukan hanya di dalam atau antara negara-negara. Konflik sosial berkepanjangan seringkali melibatkan aksi kekerasan dari kelompok-kelompok komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Ada empat faktor kunci yang berperan dalam mengubah konflik menjadi tingkat intensitas yang lebih tinggi.

1.4.1.1 *Communal Identity*

Dikatakan bahwa interaksi antara komunitas identitas dan pemerintahan dapat menjadi sumber utama masalah. Bagaimana kepentingan serta hasrat individu seperti perlindungan, pengakuan, identitas, dan sebagainya tergantung pada keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Banyaknya komunitas pasca-kolonial yang bercampur aduk mempengaruhi negara yang tidak peka terhadap kebutuhan kelompok lainnya, yang pada akhirnya mengakibatkan ketegangan dalam struktur sosial, yang berujung pada perpecahan yang menciptakan konflik sosial yang berkepanjangan. Pertikaian juga dapat muncul dari ketegangan antara berbagai kelompok etnis, ras, agama, dan budaya yang merasa terasingkan atau diabaikan oleh negara. Saat identitas komunitas tidak dihargai, maka perasaan terpinggirkan dan ketidakpuasan akan muncul.

1.4.1.2 *Deprivation of Human Needs*

Ketidakpuasan terkait kekurangan kebutuhan akan dinyatakan secara bersama-sama ketika suatu lembaga tidak mampu memenuhinya. Hal itu dapat menyebabkan munculnya perselisihan sosial yang berkepanjangan. Kebutuhan merupakan aspek yang tidak bisa ditawar. Jika persetujuan muncul akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan, maka konflik tersebut akan menjadi sangat sengit, tidak rasional, dan kejam. Kebutuhan komunitas yang harus dipenuhi mencakup kebutuhan untuk pembangunan, kebutuhan identitas (kebebasan dalam mengekspresikan budaya dan agama), kebutuhan akan akses terhadap politik, serta tiga hak fundamental (kebebasan, subsistensi, dan keamanan).

1.4.1.3 *State Role*

Fungsi negara dan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan individu serta kelompok identitas. Negara yang mengalami konflik sosial berkepanjangan biasanya ditunjukkan oleh pemerintahan yang lemah, terbatas, tidak efisien, dan gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Negara perlu memastikan bahwa semua anggota dari komunitas politik diperlakukan setara sebagai warga. Kekuatan politik tidak seharusnya digunakan untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, baik itu elit penguasa atau kelompok minoritas. Kontrol kekuasaan yang dikuasai oleh individu atau kelompok dapat menyebabkan krisis legitimasi, yang menjadi faktor penting dalam timbulnya konflik sosial berkepanjangan.

Konflik sosial berkepanjangan banyak terjadi di negara-negara berkembang dengan pertumbuhan populasi yang cepat, tetapi sumber daya terbatas. Sering kali hal ini berkaitan dengan warisan dari kolonialisme, yang mencakup institusi dengan partisipasi yang lemah, struktur hierarkis yang dipaksakan, dan alat penindasan politik yang diwariskan. Di negara yang terjebak dalam konflik sosial yang berkepanjangan, struktur kekuasaan yang rentan membatasi kemampuan politik. Negara yang dinilai gagal memenuhi tugas dasar seperti perlindungan hukum, distribusi sumber daya yang adil, dan representasi politik yang inklusif cenderung menjadi tempat terjadinya konflik. Negara yang tidak bisa mengatasi perbedaan identitas juga akan semakin memperburuk ketegangan.

1.4.1.4 *International Linkages*

Berkaitan langsung dengan interaksi antara politik dan ekonomi serta hubungan antara politik dan militer. Interaksi politik-ekonomi mengacu pada ketergantungan ekonomi dalam sistem ekonomi global, sedangkan hubungan politik-militer menghasilkan pola-pola baik regional maupun global yang berkaitan dengan kepentingan lintas negara. Negara-negara dengan kekuatan yang lemah lebih rentan terhadap pengaruh kekuatan internasional. Pengaruh pembentukan institusi politik domestik dan struktur sosial membawa dampak signifikan pada peran negara, yang dipengaruhi oleh pola hubungan dalam sistem internasional. Dalam analisis ini, intervensi atau pengaruh dari negara lain,

organisasi internasional, atau diaspora dapat memperpanjang atau memperumit situasi konflik. Dukungan yang diberikan pada salah satu pihak atau tekanan politik dari luar seringkali meningkatkan polarisasi.

1.4.2 *Humanitarian Diplomacy* (diplomasi humaniter)

Dalam buku berjudul “*The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*” (Cooper et al., 2013), Jan Egeland menyatakan bahwa diplomasi humaniter merupakan upaya untuk mempengaruhi tindakan pemimpin dan pembuat keputusan dalam segala keadaan untuk kepentingan masyarakat yang rentan dan hormat terhadap prinsip-prinsip mendasar kemanusiaan. Pihak-pihak yang dipengaruhi dalam konflik bersenjata adalah aktor negara, aktor non-negara, dan masyarakat sipil. Dilakukan melalui hubungan yang berkelanjutan, multilateral dan bilateral, formal dan informal. Konflik yang melibatkan kelompok bersenjata memerlukan tindakan kemanusiaan yang efektif agar kelompok bersenjata dapat hormat terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.

Penerimaan kelompok kemanusiaan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik secara aktif memelihara dan membangun persetujuan serta hubungan baik yang berhubungan dengan strategi mengelola keamanan dengan pihak yang bersangkutan. Metode yang terkait dengan diplomasi humaniter adalah dekonflik, yaitu perencanaan dan pertukaran informasi antara aktor militer dan aktor kemanusiaan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik. Tujuannya adalah untuk menghindari bahaya potensial bagi anggota kemanusiaan dan

menghilangkan hambatan terkait aksi kemanusiaan. Dekonflik dapat berupa negosiasi penjedaan militer, gencatan senjata, dan jalur untuk pemberian bantuan.

Dalam dokumen interview CMI bersama Jan Egeland (Turunen, 2020), orang-orang pemegang kekuasaan dalam diplomasi humaniter mengupayakan operasi kemanusiaan untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Bukan berkaitan dengan penyebaran informasi secara umum, tetapi untuk mencari suatu tujuan. Tujuan dapat berupa pengesahan konvensi yang akan mengarah ke eskalasi tindakan humaniter. Diplomasi humaniter berkaitan dengan mediasi dan negosiasi.

Negosiasi merupakan upaya mencapai suatu tujuan yang spesifik dengan pihak tertentu. Mediasi merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan antara dua atau lebih pihak mengenai suatu hal. Diplomasi humaniter bersifat pribadi dan juga publik. Suatu aktor dapat berbicara dan mempengaruhi dunia menggunakan media. Tetapi banyak hal yang tidak pantas untuk dibahas di depan publik.

Hal yang dibahas harus mempunyai dasar yang esensial, netral, berisikan kebenaran, tidak mengatasnamakan donor atau kelompok negara atau lainnya. Hal terpenting adalah berbicara dengan mengatasnamakan orang-orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jika memberikan saran untuk berubah secara pribadi tidak dilakukan, maka hal tersebut dapat dibicarakan secara publik. Diplomasi humaniter memiliki tujuh unsur.

1.4.2.1 *Humanitarian Access*

Diplomasi humaniter membuka akses bantuan terhadap pihak yang terkena dampak konflik atau bencana. Diplomasi humaniter harus berfokus pada

penerimaan datangnya aktor diplomasi, perlindungan pekerja kemanusiaan, dan akses jalan bagi bantuan kemanusiaan. Tanpa adanya penerimaan, bantuan kemanusiaan tidak akan bisa sampai. Diplomasi humaniter menjadi alat yang penting untuk keberlangsungan hidup korban.

Dalam konflik atau bencana, akses kemanusiaan seringkali terhambat oleh faktor militer, politik, atau geografis. Akses tidak hanya berkaitan dengan logistik, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi moral. Suatu organisasi kemanusiaan harus menciptakan kepercayaan dengan semua pihak yang terdampak konflik. Penting untuk melibatkan aktor lokal ke dalam diplomasi humaniter.

1.4.2.2 *Negotiation*

Negosiasi dilakukan tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan kelompok bersenjata, donor internasional, bahkan otoritas lokal. Bertujuan untuk mendistribusikan bantuan tanpa adanya diskriminasi. Negosiasi juga dapat menjamin keamanan dan mengurangi hambatan agar bantuan dapat disalurkan. Unsur ini menentukan bisa atau tidaknya bantuan masuk ke dalam wilayah berkonflik.

Negosiasi dilakukan terlepas dari risiko yang ada. Negosiasi merupakan pengakuan bahwa konflik bersifat multipolar dan kompleks. Diplomasi humaniter juga bersifat fleksibel. Aktor diplomasi humaniter harus berbicara dengan aktor yang memiliki kendali terhadap akses dan keamanan.

1.4.2.3 *Humanitarian Principle*

Mencakup netralitas, imparialitas, dan independensi. Diplomasi humaniter hanya bisa berhasil dan dapat dipercaya apabila prinsip dasar dihormati. Netralitas berarti tidak berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Independensi berarti tidak patuh terhadap kepentingan politik negara atau donor. Imparsialitas berarti bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan afiliasi etnis atau politik.

Unsur ini tidak hanya sekedar etika, tetapi juga syarat untuk mendapatkan kepercayaan. Tanpa memenuhi unsur ini, diplomasi humaniter dianggap bias dan akses bantuan akan ditutup. Komunikasi publik yang konsisten dibutuhkan untuk terus meningkatkan kepercayaan. Transparansi dalam distribusi bantuan kemanusiaan juga dibutuhkan untuk menjaga unsur ini.

1.4.2.4 *Global Advocacy*

Diplomasi humaniter tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi harus mengangkat isu kemanusiaan dalam lingkup internasional. Hal ini berarti mengadvokasi isu humaniter dalam forum internasional seperti PBB, media global, dan donor. Perlu untuk membentuk tekanan internasional dan opini publik agar pihak yang terlibat dalam konflik menghormati hukum humaniter. Diplomasi humaniter menekankan peran diplomasi sebagai penjaga norma internasional.

Hal ini berarti bahwa diplomasi berfungsi lokal untuk membuka akses, dan berfungsi global untuk menciptakan legitimasi dan dukungan. Advokasi global dapat mendorong masuknya donor untuk pendanaan berkelanjutan dalam operasi

kemanusiaan. Keputusan dalam forum multilateral juga dapat didorong apabila advokasi global dilakukan. Adanya resolusi internasional mendukung akses kemanusiaan.

1.4.2.5 *Humanitarian Reform*

Sistem bantuan yang diperlukan adalah sistem yang cepat, sederhana, dan tepat. Unsur ini mencakup penggunaan dana yang lebih efektif dan pengurangan birokrasi yang berlebihan. Birokrasi yang berlebihan dapat menghambat distribusi bantuan. Dana harus digunakan secara optimal, tidak habis oleh duplikasi program dan biaya administrasi.

Diplomasi humaniter mendorong reformasi agar bantuan yang masuk lebih responsif dan tepat sasaran. Diplomasi humaniter juga berhubungan dengan tata kelola sistem humaniter global. Unsur ini mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan dan memastikan bahwa bantuan tersalurkan sesuai kebutuhan. Korban harus merasa bahwa kebutuhan mereka telah dipenuhi.

1.4.2.6 *Preventive Diplomacy*

Diplomasi humaniter tidak hanya responsif, tetapi juga preventif. Diplomasi humaniter ada untuk mencegah eskalasi krisis ke bencana yang lebih besar. Diplomasi preventif berfokus ke upaya proaktif untuk menjaga akses kemanusiaan dan mengurangi risiko. Unsur ini memiliki inti bahwa bantuan kemanusiaan menyelamatkan korban bukan hanya merespons akibatnya, tetapi mengubah lintasan peristiwa.

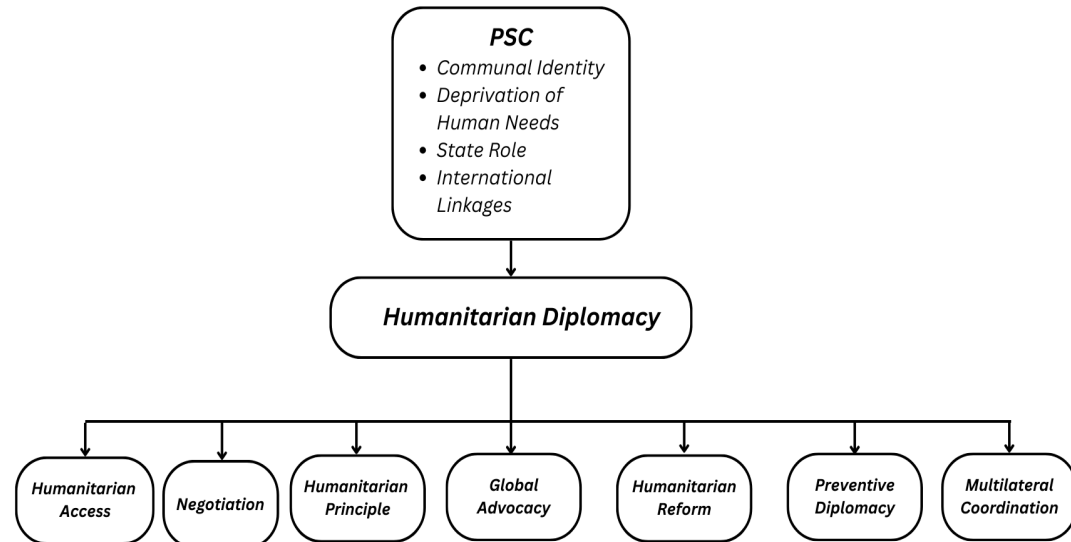
Diplomasi preventif berupa peringatan dini dan gencatan senjata. Tidak hanya sebagai penanganan darurat, tetapi juga alat pencegahan. Peringatan dini berupa pola serangan, blokade akses, ketegangan komunitas, dan cuaca ekstrem apabila berkaitan dengan bencana. Unsur ini juga mencegah gangguan berulang terhadap fasilitas kesehatan dan konvoi.

1.4.2.7 *Multilateral Coordination*

Diplomasi humaniter tidak hanya dilakukan oleh satu aktor, tetapi melibatkan banyak aktor dengan kepentingan, mandat, dan kapasitas yang berbeda. Koordinasi multilateral menyatukan berbagai aktor internasional atau aktor negara, organisasi antar-pemerintah, NGO, donor, dan masyarakat sipil yang merupakan bagian dari diplomasi humaniter. Kepentingan yang berbeda harus disatukan agar bantuan kemanusiaan saling melengkapi. Tanpa koordinasi, dapat terjadi pertentangan.

Diplomasi humaniter harus memastikan sinergi antar lembaga agar tidak terjadi juga tumpang tindih dan persaingan dalam penyaluran bantuan. Dengan begitu, bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara sempurna. Bantuan harus tersebar merata di wilayah yang terdampak konflik. Pihak yang berkonflik juga harus menerima pesan yang konsisten dari komunitas internasional.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. Sintesa Pemikiran
Sumber: Diolah oleh penulis

Teori PSC menjelaskan bagaimana suatu konflik dapat didefinisikan sebagai konflik berkepanjangan. Teori PSC mencakup empat faktor, yaitu *communal identity*, *deprivation of human needs*, *state role*, dan *international linkages*. Dampak dari PSC diminimalisir oleh aktor *Humanitarian Diplomacy*. *Humanitarian Diplomacy* mencakup tujuh unsur, yaitu *humanitarian access*, *negotiation*, *humanitarian principle*, *global advocacy*, *humanitarian reform*, *preventive diplomacy*, dan *multilateral coordination*.

1.6 Argumentasi Utama

Konflik Somalia merupakan konflik sosial berkepanjangan yang dimulai dari tahun 1970 sampai sekarang. Konflik Somalia memenuhi empat faktor dari PSC, yaitu (1) *Communal identity*, terdapat banyak kelompok pemberontak di

dalam Konflik Somalia seperti Al-Shabaab, *Somali National Movement* (SNM), *Somali Salvation Democratic Front* (SSDF), dan *United Somali Congress* (USC); (2) *Deprivation of human needs*, kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang ada di Somalia termasuk rezim Siad Barre dan *Transitional Federal Government* (TFG); (3) *State role*, Pemerintahan Somalia tidak banyak dipercaya oleh masyarakat Somalia dan dianggap lebih mementingkan kepentingan klan; (4) *International linkages*, intervensi internasional telah dilakukan oleh PBB melalui beberapa misi seperti UNOSOM I dan UNOSOM II tetapi tidak membuahkan hasil yang baik dan akhirnya terjadi penarikan misi. Pada masa-masa yang kritis tersebut, Uni Afrika mengizinkan intervensi secara paksa di negara anggota dalam keadaan yang serius seperti kejahatan dalam perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida. Serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Al Shabaab membuat Uni Afrika mendirikan AMISOM pada tahun 2007.

AMISOM memenuhi tujuh unsur diplomasi humaniter dalam rentang tahun 2018-2021. *Humanitarian access*, AU menekankan bahwa AMISOM memastikan koridor kemanusiaan tetap terbuka meskipun terjadi serangan di wilayah yang dikuasai Al-Shabaab. *Negotiations*, AMISOM melakukan dialog dengan pemerintah Somalia juga otoritas lokal untuk menjamin akses bantuan. AMISOM juga mengambil peran dalam mediasi antara komunitas dan pemerintah Somalia. *Humanitarian principle*, AMISOM menekankan perlindungan kepada masyarakat lokal tanpa adanya diskriminasi. AMISOM melindungi seluruh masyarakat yang terdampak serangan Al-Shabaab. Selain memberikan

perlindungan terhadap masyarakat, AMISOM juga tetap melindungi institusi-institusi yang ada di Somalia. *Global advocacy*, melalui laporan rutin terhadap Dewan Keamanan UN, AMISOM mengangkat isu kemanusiaan yang terjadi akibat Konflik Somalia ke lingkup global. *Humanitarian reform*, AMISOM melakukan koordinasi logistik dengan UNSOA (UN Support Office for AMISOM) untuk mempercepat peredaran bantuan. *Preventive diplomacy*, AMISOM melakukan perubahan dalam penempatan pasukan di sektor-sektor yang strategis serta di kawasan dengan populasi yang padat untuk melindungi warga sipil dan mengurangi pengaruh kelompok pemberontak yang sedang beroperasi. *Multilateral coordination*, AMISOM melakukan kerja sama dengan lembaga kemanusiaan untuk memperkuat stabilitas Somalia. Hal ini membuktikan bahwa dampak PSC dapat diminimalisir dengan diplomasi humaniter.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian secara deskriptif. Metode secara deskriptif merupakan metode untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul dengan sebagaimana adanya (Sugiyono, 2013). Melalui penggunaan metode penelitian secara deskriptif, penulis berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana strategi diplomasi humaniter yang dijalankan oleh Uni Afrika melalui AMISOM dalam penanganan konflik berkepanjangan di Somalia dari tahun 2018 hingga tahun 2021 secara kompleks dan terperinci.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk menjelaskan fenomena yang penulis pilih, maka jangkauan penelitian mengenai “bagaimana strategi diplomasi humaniter yang dijalankan oleh Uni Afrika melalui AMISOM dalam menangani konflik berkepanjangan di Somalia tahun 2018–2021” dimulai dengan tahun 2018 yang menandai perubahan mandat AMISOM untuk lebih berfokus ke arah stabilisasi, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian. Diakhiri pada tahun 2021 yang menjadi tahun terakhir AMISOM untuk beroperasi sebelum berganti menjadi misi baru.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pilih untuk studi ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Untuk memperkuat penelitian kualitatif melalui informasi serta data yang diperoleh dari analisis fenomena yang menjadi fokus studi, data sekunder berfungsi sebagai pendukung dalam analisis yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengumpulkan data sekunder dengan cara menjelajahi pustaka, termasuk buku, dokumen, situs resmi, jurnal penelitian, dan sumber internet yang dapat dipercaya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam studi ini, penulis menerapkan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai makna serta pengamatan secara tepat terhadap berbagai

fenomena yang ada. Penelitian kualitatif menghadirkan hasil dalam bentuk deskripsi yang rinci tentang isu yang dibahas. Metode ini lebih menekankan pada penggambaran dan penjelasan dengan menggunakan kata-kata. Penulis menerapkan teknik analisis data kualitatif untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan bidang sosial, khususnya yang berhubungan dengan hubungan internasional. Dalam karya ini, penulis menggunakan teori yang diuraikan oleh para pakar dan kemudian akan menghubungkannya dengan konflik, permasalahan, dan fenomena yang terjadi di dunia hubungan internasional.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini membahas dasar-dasar penelitian yang menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan riset. Dalam bagian ini terdapat latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumentasi utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dengan cara ini, penulis dapat menjalani proses analisis dengan lebih fokus.

Bab II. Analisis *Protracted Social Conflict* dalam Konflik Somalia

Bagian ini menerapkan teori atau konsep yang dipilih oleh penulis. Penulis akan menghubungkan empat elemen dari *Protracted Social Conflict* ke dalam situasi konflik yang terjadi di Somalia. Elemen-elemen tersebut adalah *communal identity*, *deprivation of human needs*, *state role*, dan *international linkages*.

Bab III. Implementasi *Humanitarian Diplomacy* oleh AMISOM dalam Konflik Somalia Tahun 2018-2021

Penulis akan menguraikan unsur diplomasi humaniter yang dilakukan oleh AMISOM dalam konflik berkepanjangan di Somalia antara tahun 2018 hingga 2021. Unsur tersebut meliputi *humanitarian access, negotiations, humanitarian principle, global advocacy, humanitarian reform, preventive diplomacy, dan multilateral coordination*. Bab ini menjelaskan beragam strategi diplomasi humaniter yang telah dilakukan oleh AMISOM selama periode tersebut. Penulis juga akan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan di bagian ini.

Bab IV. Penutup

Di bagian penutup, terdapat kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dirangkai secara jelas dan ringkas untuk menggabungkan semua temuan penting dalam penelitian yang telah dilaksanakan. Rekomendasi disampaikan oleh penulis sebagai bentuk saran untuk pihak-pihak terkait atau peneliti yang akan datang. Penutup berfungsi sebagai kontribusi terakhir terhadap keseluruhan penelitian dan penyelesaian masalah yang telah dikaji.